

REVITALISASI DAN PENGELOLAAN BERKELANJUTAN TAMAN AMPERA
SKATEPARK YANG TERBENGKALAI DI KOTA PALEMBANG

M Imam Maulidandy¹, Chlesea Byanca Riski Amelia², Des Suryani³, Junaidi⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.

⁴Dosen FISIP, Universitas Sriwijaya, Indonesia.

Email Korespondensi: imam53980@gmail.com

ABSTRACT

Ampera Skatepark in Palembang, built to support the 2018 Asian Games as a strategic public space, is now experiencing serious degradation due to weak governance, minimal maintenance budgets, and a lack of community involvement. This study aims to analyse the root causes of the problem, map the social and physical impacts, and formulate policy recommendations for the revitalisation of the skatepark. The methods used were field observations, interviews with visitors and the skateboarding community, and policy analysis based on multiple perspectives and the Patton & Sawicki evaluation framework. The results of the study show that infrastructure damage, poor hygiene, and low security have reduced the social function of the park, triggered deviant activities, and damaged the city's image. The analysis of policy alternatives emphasises the need for a hybrid management model involving the city government, the skateboarding community, and the private sector through a Corporate Social Responsibility (CSR) scheme. Policy Alternative concludes that technical revitalisation, the establishment of a partnership forum, operational regulations, and digital-based participatory monitoring mechanisms are strategic steps to restore the park's function as a safe, inclusive, and sustainable public space.

Keywords: City park, CSR, Policy analysis, Public policy, Skatepark.

ABSTRAK

Taman Ampera Skatepark di Palembang, yang dibangun untuk mendukung Asian Games 2018 sebagai ruang publik strategis, kini mengalami degradasi serius akibat lemahnya tata kelola, minimnya anggaran pemeliharaan, serta kurangnya pelibatan komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah, memetakan dampak sosial dan fisik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan revitalisasi skatepark. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara dengan pengunjung dan komunitas skateboard, serta analisis kebijakan berbasis perspektif berganda dan kerangka evaluasi Patton & Sawicki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur, kebersihan yang buruk, dan keamanan rendah telah menurunkan fungsi sosial taman, memicu aktivitas menyimpang, serta merusak citra kota. Analisis alternatif kebijakan menekankan perlunya model pengelolaan hybrid yang melibatkan pemerintah kota, komunitas skateboard, dan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Alternatif kebijakan menegaskan bahwa revitalisasi teknis, pembentukan forum kemitraan, regulasi operasional, serta mekanisme pengawasan partisipatif berbasis digital merupakan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi taman sebagai ruang publik yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Analisis kebijakan, CSR, Kebijakan publik, Skatepark, Taman kota

PENDAHULUAN

Taman Ampera Skatepark di Palembang sebagai bagian dari persiapan Asian Games Jakarta–Palembang, dengan tujuan menyediakan ruang publik strategis sekaligus wadah bagi komunitas skateboard dan olahraga ekstrem. Lokasinya yang berada di pusat kota, dekat Jembatan Ampera sebagai ikon Palembang, menjadikan skatepark ini simbol penting bagi citra kota dan ruang interaksi sosial

masyarakat. Tujuan awal kehadiran dari Taman Ampera Skatepark ini dibangun dengan untuk pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Palembang. Selain itu, taman ini dirancang sebagai sarana aktualisasi bagi anak-anak muda, khususnya pecinta olahraga ekstrem seperti skateboard, dan juga berfungsi sebagai destinasi wisata baru di Palembang (Gerrard, 2022). Namun, kondisi saat ini menunjukkan degradasi serius: infrastruktur rusak, fasilitas pendukung hilang atau tidak berfungsi, kebersihan tidak terjaga, serta keamanan rendah terutama pada malam hari. Situasi ini menurunkan fungsi sosial taman, memicu aktivitas menyimpang, dan merusak citra kota. Contoh pada studi kasus di kota Makassar yaitu Faktor fisik, teknis, dan ekstrinsik secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas RTH di taman studi. Strategi yang diusulkan berupa pengembangan kualitas RTH, peningkatan fasilitas rekreasi, penyediaan kolam pemancingan, dan pemanfaatan lokasi taman untuk kegiatan lainnya (Delima S. et al., 2024).

Pembangunan taman ini merupakan hasil kerjasama pemerintah kota dengan PDAM Tirta Musi dan diresmikan pada Februari 2018 (Zilhakim, 2018). Fokus utamanya lebih ke penambahan fasilitas publik berupa ruang terbuka yang dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya komunitas olahraga ekstrem dan pemuda, sekaligus menjadi ikon baru dan destinasi wisata lokal. Namun, ada kerjasama dengan pihak swasta (seperti Gojek) dalam proses revitalisasi untuk mendukung pengembangan taman (Agustin, 2020).

Masalah Publik adalah belum terpenuhinya kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang diinginkan oleh publik (bukan hanya individu), dan pemenuhannya hanya mungkin melalui kebijakan pemerintah (Subarsono, 2005). Berdasarkan pengertian tersebut, dampak yang terlihat saat ini cukup beragam. Awalnya Taman Ampera Skatepark menjadi magnet bagi anak muda Palembang sebagai tempat berkumpul dan berolahraga skateboard, sepeda BMX, sepatu roda (Angga, 2025). Namun, sejak 2020 dan seterusnya kondisinya mulai menurun, banyak fasilitas yang terbengkalai, tidak terawat, bahkan ada kondisi kotor, berlumut, dan beberapa bagian rusak sehingga taman menjadi kurang diminati (Agustin, 2020). Pemerintah kota bersama pihak swasta perlu berencana untuk melakukan revitalisasi demi pemulihan dan mengembalikan fungsi taman serta menarik kembali komunitas dan pengunjung.

Permasalahan penelitian ini penting karena skatepark bukan sekadar fasilitas olahraga, melainkan ruang publik yang berperan dalam membangun interaksi sosial, mendukung kesehatan masyarakat, dan memperkuat identitas kota. Lemahnya tata kelola, minimnya anggaran pemeliharaan, serta rendahnya pelibatan komunitas menyebabkan taman terbengkalai. Jika tidak segera ditangani, kerusakan akan semakin parah, biaya perbaikan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Mayoritas masyarakat menilai kondisi ruang publik dan fasilitas pejalan kaki sudah dalam kondisi baik, dengan taman yang asri dan fasilitas yang memadai. Namun terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya toilet, jalur difabel, tempat sampah, CCTV, dan kondisi jalur pejalan kaki yang belum aman dan nyaman. Aktivitas informal seperti pedagang kaki lima masih perlu pengaturan agar tidak mengganggu kenyamanan. Rekomendasi termasuk penambahan fasilitas seperti jalur difabel, toilet, tempat parkir, lampu penerangan, CCTV, serta peningkatan tema ruang publik agar lebih beragam dan menarik (Kusuma, 2024). Penelitian tersebut didukung dari studi kasus taman di kota Bandung yang menyebutkan Kinerja operasi dan pemeliharaan fasilitas taman di Bandung secara umum buruk, dengan banyak fasilitas yang rusak dan tidak terawat termasuk area bermain anak, jalur pejalan kaki, tempat duduk, dan penerangan. Kepuasan pengguna juga rendah dan aksesibilitas belum memadai (Tri Setyowati et al., 2024).

Studi kasus lain menyebutkan, Pengelolaan taman wisata alam Wira Garden sudah mengarah pada konsep green economy dengan beberapa kegiatan pengelolaan sampah berbasis konsep 3R, meskipun anggaran terbatas. Pengelola secara mandiri melakukan perawatan lingkungan dan mengembangkan atraksi yang menyatu dengan alam untuk menjaga kelestarian serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. Namun, masalah utama adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat pengunjung terhadap pengelolaan sampah, lokasi geografis yang sulit dijangkau, dan keterbatasan dana pengelolaan (Diogsha & Noviarita, 2024).

Mengutip dari studi taman kota di Magelang, tiga dari lima taman kota aktif di Magelang memenuhi kriteria ruang publik ramah anak. Taman Badaan dan Blooms Skatepark memenuhi

kebutuhan bermain anak sesuai umur. Namun, fasilitas pendukung seperti toilet ramah anak dan fasilitas disabilitas masih terbatas, dan keamanan serta kenyamanan perlu ditingkatkan (Amanda et al., 2024). Luas RTH publik di Kota Palembang baru sekitar 8%, jauh di bawah standar minimal 20% menurut UU. Pemerintah Kota sudah melakukan berbagai upaya penambahan RTH seperti pengadaan taman kota dan penanaman pohon di pinggir jalan. Hambatan utama mencakup banyaknya lahan pribadi yang belum dibebaskan, perlunya masterplan yang melibatkan berbagai pihak, serta keterbatasan dana pembangunan dan perawatan RTH (Khotimah, 2024). RTH di lokasi penelitian pada di kampung 3-4 ulu laut di Palembang masih jauh dari standar (hanya 2,41% dari kebutuhan) namun berpotensi ditingkatkan hingga 50%. Perencanaan berbasis ekologi-sosial dengan konsep urban acupuncture dan green links diajukan untuk mengoptimalkan fungsi sosial dan lingkungan (Muhammad et al., 2024). Taman yang ada belum optimal: fasilitas publik terbatas, ruang interaksi kurang mendukung, area bermain dan toilet minim, serta vegetasi belum dimanfaatkan maksimal. Rancangan baru lebih inklusif, menggunakan vegetasi lokal, sistem pengelolaan air alami, dan memperkuat fungsi sosial masyarakat (Tonapa Arung et al., 2025).

Kajian literatur terdahulu banyak membahas pengelolaan ruang terbuka hijau, konsep green city, partisipasi komunitas, serta pemeliharaan aset publik. Pada studi kasus di Taman Kota Blang Padang berada pada kategori "cukup sesuai" dengan tingkat kesesuaian 54,76% terhadap konsep green city. Variabel fasilitas taman dan komunitas hijau sudah baik, tetapi aspek vegetasi, energi terbarukan, pengelolaan air dan sampah, serta transportasi ramah lingkungan masih perlu banyak peningkatan, terutama penyediaan energi terbarukan, sistem pengelolaan air dan sampah ramah lingkungan, dan jalur transportasi hijau (Fitria et al., 2024). Kemudian pada penelitian di Taman Lapangan Merdeka Kota Sukabumi, Interaksi sosial di area UMKM memiliki pengaruh parsial dan simultan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, sedangkan interaksi sosial di area lapangan, komunal, dan trek olahraga tidak berpengaruh secara signifikan. Area UMKM sebagai inovasi baru menjadi daya tarik dan media interaksi yang meningkatkan kepuasan pengunjung (Khutami & Adharina, 2024).

Sebagian besar studi bersifat umum atau berfokus pada kasus di kota lain, sehingga belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah skatepark sebagai ruang publik dengan karakteristik unik, terutama dalam konteks kebijakan operasional dan model pengelolaan. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada Taman Ampera Skatepark di Palembang, dengan pendekatan kebijakan operasional berbasis data lapangan melalui observasi dan wawancara komunitas pengguna. Kebaruan penelitian (novelty) ditunjukkan melalui usulan model pengelolaan hybrid yang menggabungkan peran pemerintah kota, komunitas skateboard, dan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Pendekatan ini tidak hanya menjawab masalah fisik dan sosial taman, tetapi juga menawarkan solusi berkelanjutan dengan regulasi operasional dan mekanisme pengawasan partisipatif berbasis digital.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akar permasalahan terbenkalkainya Taman Ampera Skatepark, memetakan dampak sosial dan fisik yang muncul, serta merumuskan rekomendasi kebijakan revitalisasi melalui model pengelolaan hybrid yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga skatepark dapat kembali berfungsi sebagai ruang publik yang aman, bersih, dan representatif bagi masyarakat Palembang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui observasi langsung di Taman Ampera Skatepark untuk menilai kondisi fisik, kebersihan, keamanan, serta aktivitas sosial. Observasi dilakukan pada siang dan malam hari agar diperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika penggunaan taman. Selain itu, wawancara mendalam dengan pengunjung, pedagang sekitar, dan komunitas skateboard dipilih secara purposive untuk memastikan relevansi data. Dokumentasi berupa foto, catatan wawancara, serta regulasi terkait turut dikumpulkan sebagai penguat analisis. Data kemudian dianalisis menggunakan kerangka perspektif berganda untuk melihat masalah dari sudut pandang masyarakat, komunitas skateboard, pemerintah kota, dan sektor

swasta. Analisis asumsi kebijakan digunakan untuk menguji keyakinan bahwa revitalisasi skatepark akan meningkatkan fungsi sosial, keamanan, dan citra kota. Proses perumusan masalah mengikuti empat fase: pencarian, pendefinisian, spesifikasi, dan pengenalan masalah dengan metode Analisis Perspektif Berganda (Dunn, 2018). Selanjutnya, kerangka evaluasi Patton & Sawicki (2016) dipakai untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan nyata, sementara metode perbandingan Dunn digunakan untuk menilai alternatif kebijakan yang paling efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menghasilkan gambaran komprehensif mengenai akar masalah, dampak sosial-fisik, serta rekomendasi kebijakan aplikatif bagi Pemerintah Kota Palembang.

PEMBAHASAN

Pernyataan Kebijakan

Tujuan analisis kebijakan ini untuk merevitalisasi dan mengelola secara berkelanjutan Taman Ampera Skatepark di Kota Palembang sebagai ruang publik yang aman, inklusif, dan fungsional. Fokus utama kebijakan adalah mengembalikan fungsi sosial taman, meningkatkan kualitas infrastruktur dan kebersihan, serta membangun sistem pengelolaan kolaboratif antara pemerintah, komunitas pengguna, dan mitra swasta. Alternatif Kebijakan ini merekomendasikan pendekatan kemitraan antara Pemerintah Kota Palembang, komunitas skateboard, dan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi kriteria kebijakan. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan faktor-faktor yang menyebabkan Taman Ampera Skatepark menjadi terbengkalai sampai saat ini. Temuan wawancara menjadi pendukung kondisi tersebut, dimana pengelola maupun dari taman tersebut tidak ada. Kondisi fasilitas juga menjadi kendala, karena arena skate, taman bermain, sudah sebagian ada yang hilang dan akibat kerusakan dan kebersihan yang buruk tanpa perawatan sama sekali oleh pihak terkait. Partisipasi masyarakat dan komunitas pun belum terlihat, rata-rata warga masih enggan membuang sampah pada tempatnya karena kurangnya tempat sampah yang terkesan tidak peduli terhadap kebersihan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelola dan pemerintah belum melihat ini sebagai taman kota yang inklusif dan aman, padahal letak dari taman ini berada pada tengah kota yang sangat strategis.

Profil kebijakan yang akan diusulkan dari analisis kebijakan adalah kebijakan yang dapat menghasilkan taman yang memiliki keamanan dan kenyamanan serta pemeliharaan dan pengawasan dengan program terbaik serta realistis yang ada di Kota Palembang. Kebijakan ini berfokus pada revitalisasi teknis yang aman dan memiliki peraturan daerah tersendiri untuk operasional khusus. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong partisipasi aktif secara hybrid dari pemerintah, komunitas, masyarakat, dan CSR dalam pengelolaan Taman Ampera Skatepark ini. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memanfaatkan kapasitas administratif Pemda, pengetahuan lokal komunitas pengguna, dan sumber daya tambahan dari CSR sehingga diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pemerintah dan memastikan kepemilikan taman tersebut.

Kriteria Evaluasi

Evaluasi kebijakan perlu menggunakan seperangkat kriteria yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menilai sejauh mana suatu alternatif kebijakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kriteria evaluasi berfungsi sebagai tolok ukur objektif dalam membandingkan efektivitas dan dampak setiap alternatif, serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih transparan dan sistematis (Patton et al., 2016). Evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan kriteria dari Patton (2016) yaitu efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Setiap kriteria dibuat Skala penilaian 1-4. Hal ini dilakukan supaya penilaian dapat dilakukan secara objektif. Kriteria tersebut digunakan untuk menilai kelayakan dari masing-masing alternatif kebijakan agar menghasilkan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi nyata.

Kriteria efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan taman mencapai tujuannya dalam menyediakan ruang publik yang aman, bersih, dan fungsional. Skor 1 (rendah) kebijakan tidak mengubah kondisi taman secara signifikan; fungsi sosial tetap rendah; pengunjung tetap enggan datang. Nilai 2 (sedang) ada perbaikan terbatas, tetapi belum menyentuh akar masalah seperti keamanan malam dan partisipasi komunitas. Nilai 3 (cukup tinggi) fungsi taman mulai pulih, pengunjung meningkat, namun belum ada sistem pengawasan dan pemeliharaan berkelanjutan. Nilai 4 (sangat tinggi) taman aktif kembali, aman siang dan malam, komunitas terlibat, citra kota membaik secara nyata. Pada Taman Ampera Skatepark, efisiensi menilai optimalisasi penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, dan tenaga kerja) dalam pelaksanaan kebijakan. Nilai 1 (rendah) berarti biaya besar, hasil minim; revitalisasi tanpa partisipasi atau pembiayaan alternatif. Nilai 2 (sedang) menggambarkan biaya yang cukup besar, manfaat mulai terasa, tetapi belum ada efisiensi jangka panjang. Nilai 3 (cukup tinggi) kebijakan berjalan efisien, Biaya ditanggung bersama (APBD + CSR), manfaat sosial dan ekonomi mulai muncul. Nilai 4 (sangat tinggi) yaitu biaya menjadi lebih rendah karena kolaboratif, manfaat luas dan berkelanjutan, serta ada penghematan secara jangka panjang.

Ekuitas berarti menilai sejauh mana kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas pengguna taman. Ini mencakup pemerataan akses masyarakat terhadap Taman Ampera Skatepark. Nilai 1 (rendah) taman hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu; tidak ramah anak, perempuan, atau difabel. Nilai 2 (sedang) sudah terlihat taman terbuka untuk umum, tapi fasilitas belum mendukung kelompok rentan. Nilai 3 (cukup tinggi) ada upaya penyediaan fasilitas inklusif, meski belum sepenuhnya terpenuhi. Nilai 4 (sangat tinggi) taman telah dirancang ulang dengan prinsip inklusivitas: akses difabel, penerangan aman, ruang komunitas terbuka. Kelayakan politik menilai sejauh mana kebijakan dapat diterima dan didukung oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat. Nilai 1 (rendah) menggambarkan ketiadaan dukungan politik; janji revitalisasi tidak ditindaklanjuti. Nilai 2 (sedang) ada komitmen verbal, tapi belum ada alokasi anggaran atau regulasi pendukung. Nilai 3 (cukup tinggi) Pemerintah mulai merespon laporan masyarakat dan membuka ruang dialog. Nilai 4 (sangat tinggi) revitalisasi bisa masuk agenda prioritas seperti RPJMD atau Renja Kota Palembang, didukung regulasi dan anggaran, serta partisipasi legislatif secara nyata.

Kelayakan administratif berkaitan dengan kemampuan lembaga pelaksana dalam mengelola, mengoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik. Nilai 1 (rendah) mencerminkan kondisi saat ini, yaitu tidak ada SOP, koordinasi antar-dinas lemah, petugas tidak hadir secara rutin. Nilai 2 (sedang) menunjukkan bahwa terdapat struktur birokrasi, tapi belum ada mekanisme operasional atau regulasi teknis. Nilai 3 (cukup tinggi) menunjukkan kesiapan administratif yang baik, dinas terkait mulai berkoordinasi, ada draft SOP, petugas mulai dijadwalkan. Nilai 4 (sangat tinggi) berarti sistem operasional berjalan sangat baik, SOP mulai diterapkan, koordinasi lintas dinas bisa lebih aktif dan responsif dalam kerjasama.

Analisis Alternatif Kebijakan.

Dari hasil diskusi kelompok yang melibatkan perspektif multidisiplin, kami memperoleh tiga alternatif kebijakan utama sebagai berikut, yang masing-masing dievaluasi berdasarkan kelayakan, dampak, dan implikasi implementasi. Alternatif kebijakan pertama berfokus pada revitalisasi teknis yang mengutamakan aspek fisik dan kenyamanan pengguna dengan perbaikan menyeluruh. Alternatif kebijakan kedua yaitu membuat peraturan operasional khusus dari wali kota atau kepala daerah yang mengatur standar teknis fasilitas, jadwal rutin, hingga pembagian tanggung jawab stakeholders. Alternatif kebijakan ketiga merupakan kebijakan CSR yang mengadopsi pendekatan kolaboratif melalui kerjasama pemerintah, komunitas lokal, dan swasta untuk mengoptimalkan efisiensi dan keberlanjutan.

1. Revitalisasi Teknis Terintegrasi

Alternatif ini menekankan pada intervensi infrastruktur prioritas, termasuk rehabilitasi permukaan lintasan skatepark, optimalisasi sistem drainase, peningkatan instalasi penerangan, serta pemulihan fasilitas pendukung seperti tempat duduk dan wadah sampah. Fokus utama adalah pada aspek keselamatan fisik dan kenyamanan pengguna, disertai dengan perbaikan estetika keseluruhan taman,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik) 201

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



guna mengembalikan peran rekreasinya sebagai ruang publik yang inklusif. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik taman, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi rusak. Alternatif ini dipilih karena kondisi fisik Taman Ampara Skatepark yang telah mengalami degradasi parah, sehingga tidak lagi memenuhi standar keselamatan dan fungsionalitas dasar sebagai ruang publik. Melalui intervensi prioritas pada infrastruktur inti seperti rehabilitasi permukaan lintasan, optimalisasi sistem drainase, dan peningkatan penerangan, kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan keamanan dan daya tarik bagi pengguna. Diferensiasinya terletak pada fokus eksklusif terhadap pembenahan fisik secara holistik, yang menjadi fondasi esensial untuk merevitalisasi fungsi sosial taman, sebelum intervensi lain dapat efektif.

2. Peraturan Operasional Khusus untuk Skatepark

Alternatif ini melibatkan pengembangan instrumen hukum formal, seperti Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang mengatur standar teknis fasilitas, jadwal pemeliharaan rutin, pembagian tanggung jawab antar-pemangku kepentingan, serta mekanisme pengawasan terhadap keamanan dan kebersihan. Dengan demikian, kebijakan ini memberikan kerangka kepastian hukum dan teknis yang esensial untuk menjaga kualitas taman secara berkelanjutan, mencegah pengulangan masalah akibat ketidakjelasan prosedur, dan mendukung evaluasi kinerja implementasi di masa depan.

Kebijakan ini diusulkan karena adanya kebutuhan mendesak akan kerangka hukum dan teknis yang jelas untuk mengatur pemeliharaan serta pengelolaan taman, mengingat ketidakpastian prosedur saat ini yang memperburuk degradasi. Instrumen seperti Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) akan menetapkan standar fasilitas, jadwal pemeliharaan rutin, tanggung jawab pihak terkait, dan mekanisme pengawasan. Diferensiasinya adalah bentuk regulasi formalnya, yang menjamin konsistensi dan akuntabilitas dalam implementasi, membedakannya dari pendekatan operasional yang lebih ad hoc atau non-binding.

3. Model Pengelolaan Hybrid antara Pemerintah, Komunitas, CSR

Kebijakan ini mengadopsi pendekatan kolaboratif melalui pembentukan kemitraan multi-stakeholder, di mana Pemerintah Kota Palembang berperan sebagai fasilitator regulasi dan penyedia dana awal, komunitas skateboard bertanggung jawab atas pengelolaan harian dan pengawasan lapangan, serta sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mendukung pendanaan pemeliharaan jangka panjang. Model hybrid ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya, memastikan keberlanjutan operasional, dan memperkuat rasa kepemilikan komunitas, sehingga mengurangi beban fiskal pemerintah sambil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola ruang publik (Yusuf Wibisono, 2007).

Pemilihan model ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sinergi antar-pemangku kepentingan, di mana Pemerintah Kota Palembang berfungsi sebagai regulator dan penyedia dana awal, komunitas skateboard sebagai aktor lapangan yang langsung terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan, serta sektor swasta melalui mekanisme CSR untuk mendukung pendanaan berkelanjutan. Yang membedakannya dari alternatif lain adalah penekanan pada partisipasi aktif dan kolaborasi multi-stakeholder, yang tidak hanya menangani perbaikan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan tata kelola melalui peningkatan rasa kepemilikan dan efisiensi alokasi sumber daya.

Kemudian, pemilihan opsi ini didasari oleh temuan (Rasyid & Purbaningrum, 2024) yang menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan taman tersebut, diharapkan adanya revitalisasi dan pengelolaan yang lebih terintegrasi serta partisipatif, dengan fokus utama pada peningkatan pemeliharaan rutin, penguatan pengawasan keamanan, keterlibatan aktif dari komunitas pengguna, serta penguatan sumber pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun skema kemitraan antara publik dan swasta.

Tabel 1: Perbandingan Keuntungan dan Kerugian Alternatif kebijakan

Alternatif Kebijakan	Keuntungan	Kerugian
Revitalisasi Terintegrasi	Memperbaiki infrastruktur inti (lintasan, drainase, penerangan, fasilitas pendukung); meningkatkan daya tarik dan keselamatan; hasil cepat terlihat.	Memperbaiki infrastruktur inti (lintasan, drainase, penerangan, fasilitas pendukung); meningkatkan daya tarik dan keselamatan; hasil cepat terlihat.
Peraturan Operasional Khusus	Memberikan kepastian hukum; standar teknis jelas; akuntabilitas antar-dinas meningkat; mencegah degradasi berulang.	Proses legislasi bisa lama; implementasi bergantung pada kapasitas birokrasi; tanpa anggaran tetap bisa mandek. Tinggi pada kelayakan administratif & politik, tapi efektivitas langsung di lapangan lebih lambat.
Hybrid CSR	Mengurangi beban fiskal pemerintah; meningkatkan partisipasi komunitas; memperkuat rasa kepemilikan; lebih berkelanjutan.	Membutuhkan koordinasi intensif antar-aktor; potensi konflik kepentingan; butuh regulasi pendukung. Tinggi pada efisiensi, ekuitas, dan keberlanjutan; tantangan administratif dan politik menengah.

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025)

Rekomendasi Kebijakan.

Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan rekomendasi kebijakan adalah memberikan alternatif kebijakan yang paling unggul dibanding dengan alternatif kebijakan yang lain (Dunn, 2018). Metode yang dipakai pada rekomendasi kebijakan ini adalah Metode Perbandingan, yaitu Semua alternatif kebijakan yang akan direkomendasikan dibandingkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk kemudian dipilih alternatif dengan nilai akumulatif tertinggi (Dunn, 2003).

Hasil Evaluasi terhadap 3 alternatif kebijakan yang dilakukan dengan menggunakan kriteria dari Dunn (2018) dan Patton, Sawicki, & Clark (2016) menunjukkan bahwa alternatif kebijakan Hybrid CSR lebih unggul dibandingkan kedua alternatif kebijakan lain. Pada Alternatif Pengelolaan Hybrid CSR memperoleh skor tertinggi dalam evaluasi komparatif, yakni 15 poin, dengan nilai tinggi pada hampir seluruh kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Aspek efektifitasnya lebih unggul karena langsung melibatkan komunitas dan mitra CSR dapat mengembalikan fungsi sosial, keamanan, dan citra kota secara bertahap. Aspek efisiensinya cukup tinggi karena pendanaan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga melibatkan CSR dan kontribusi komunitas, sehingga lebih hemat dan berkelanjutan. Aspek Ekuitasnya sangat tinggi karena taman tetap terbuka untuk semua kalangan, dan desain ulang dapat diarahkan agar lebih inklusif dan ramah kelompok rentan. Kelayakan politiknya lumayan tinggi karena Pemerintah telah menyatakan komitmen, dan tekanan publik dapat mendorong masuknya isu ini ke agenda prioritas. Kelayakan administratifnya juga lumayan tinggi karena Struktur birokrasi sudah ada, tinggal diperkuat dengan SOP dan koordinasi lintas dinas saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah Alternatif kebijakan Pengelolaan Hybrid Pemerintah, Komunitas, dan CSR sebagai kebijakan Alternatif

ini unggul karena mampu menjawab kebutuhan revitalisasi dengan pendekatan kolaboratif, efisien secara anggaran, dan berpotensi meningkatkan partisipasi serta keberlanjutan. Keterlibatan komunitas skateboard dan sektor swasta (CSR) dapat memperkuat rasa memiliki dan mempercepat pemulihan fungsi sosial taman.

Tabel 2: Perbandingan Alternatif kebijakan

Kriteria Evaluasi	Revitalisasi Terintegrasi	Peraturan Operasional Khusus	Model Pengelolaan Hybrid CSR
Efektivitas	Tinggi (3)	Sedang (2)	Sangat Tinggi (4)
Efisiensi	Sedang (2)	Cukup (3)	Cukup (3)
Ekuitas	Tinggi (3)	Sedang (2)	Sangat Tinggi (4)
Kelayakan Politik	Sedang (2)	Sedang (2)	Sedang (2)
Kelayakan Administratif	Cukup (3)	Sedang (2)	Sedang (2)
Jumlah Nilai	13	11	15

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025)

Untuk mewujudkan alternatif kebijakan tersebut, dibutuhkan yaitu rencana implementasi kebijakan revitalisasi dengan aktor yang terlibat meliputi Pemerintah Kota, dinas terkait, kelurahan, komunitas skateboard, mitra CSR, serta aparat keamanan. Sumber daya yang dibutuhkan mencakup dana APBD dan CSR, tenaga kerja kebersihan dan keamanan, material infrastruktur, serta kanal pelaporan digital. Risiko yang mungkin muncul antara lain minimnya komitmen CSR, konflik antar aktor, rendahnya partisipasi komunitas, kerusakan berulang, aktivitas menyimpang malam hari, dan lemahnya koordinasi birokrasi.

Teori perubahan adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses perubahan dalam suatu program dengan menggambarkan bagaimana kegiatan tertentu yang dilakukan akan menghasilkan suatu yang berorientasi pada perubahan (Weiss, 1995). Model ini menggambarkan tahapan input, aktivitas, output, outcome, hingga impact. Input berupa dana, komunitas aktif, material, SDM teknis, dan MoU. Aktivitas meliputi pembentukan forum, penandatanganan MoU, perbaikan infrastruktur, penjadwalan kebersihan dan keamanan, peluncuran kanal pelaporan, serta kegiatan komunitas. Output yang dihasilkan adalah MoU aktif, infrastruktur diperbaiki, jadwal operasional berjalan, kanal pelaporan digunakan, dan kegiatan komunitas rutin. Outcome dalam 3–6 bulan mencakup meningkatnya persepsi keamanan, kunjungan taman, serta keterlibatan komunitas. Impact dalam 6–12 bulan berupa pemulihan fungsi sosial taman, peningkatan citra kota, dan replikasi model pengelolaan kolaboratif.

Pada tahap Monitoring dapat dilakukan secara berkala saat berlangsungnya suatu kegiatan atau proyek. Sedangkan evaluasi yaitu menilai secara keseluruhan apakah pelaksanaan program tersebut telah dilakukan sesuai rencana atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi mengukur soal berhasil atau tidaknya program yang telah dilaksanakan (Huraerah, 2008).

KESIMPULAN

Taman Ampera Skatepark di Palembang menghadapi tantangan serius berupa kerusakan infrastruktur, rendahnya kebersihan, lemahnya pengawasan, serta menurunnya fungsi sosial sebagai ruang publik, yang berakar pada tata kelola dan alokasi anggaran yang tidak memadai serta minimnya partisipasi komunitas. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan komprehensif berbasis kolaborasi antara pemerintah, komunitas skateboard, dan sektor swasta melalui mekanisme CSR dengan model pengelolaan hybrid. Kebijakan ini mencakup revitalisasi teknis (perbaikan lintasan, penerangan, drainase), regulasi operasional melalui Peraturan Walikota/Daerah, serta penguatan keamanan malam hari dengan penerangan tambahan, patroli, dan CCTV, sehingga skatepark dapat kembali berfungsi sebagai ruang publik yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agustin, F. M. (2020). Pesing dan Tak Terurus, Ampera Skate Park Palembang Direvitalisasi. *IDN Times - Sumsel*. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumatera-selatan/pesing-dan-tak-terurus-ampera-skate-park-palembang-direvitalisasi-00-dvg48-ngzcrt>
- Amanda, A. P., Rahayu, M. J., & Pujantiyo, B. S. (2024). Taman kota aktif di Kota Magelang: Ramah anak? *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2). <https://doi.org/10.20961/region.v19i2.76704>
- Angga. (2025). Kondisi Ampera Skate Park Palembang Memprihatikan, Berlumut, Kotor, Banyak Sampah dan Bau Busuk. *Sripoku.Com*.
- Delima S., S. A., Manaf, M., & Salim, A. (2024). Strategi Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Taman Maccini Sombala Kota Makassar. *Urban and Regional Studies Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.35965/ursj.v7i1.4608>
- Diogsha, H., & Noviarita, H. (2024). Implementasi Konsep Green Economy Terhadap Pengelolaan Taman Wisata Alam Wira Garden Kota Bandar Lampung, Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 7(01). <https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.96>
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Cetakan Kedua. In *Gadjah Mada University Press*.
- Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach, sixth edition. In *Public Policy Analysis: An Integrated Approach, Sixth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Fitria, A., Yudana, G., & Suminar, L. (2024). Penerapan Konsep Green City pada Taman Kota (Studi Kasus: Taman Kota Blang Padang, Kota Banda Aceh). *Desa-Kota*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v6i2.84771.98-110>
- Gerrard, M. V. (2022). *Pengamatan Taman Ampera Skatepark - Analisis Karakter Taman Kota*. <https://www.scribd.com/document/691615812/ilovepdf-merged-3Agustin>
- Huraerah, A. (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan. In *Humaniora*.
- Khotimah, R. K. (2024). PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG The Implementation of Legal Provisions Governing Green Open Space in Palembang City. *AMICUS CURIAE*. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/amicuscuriae/article/view/20227>
- Khutami, N., & Adharina, N. D. (2024). PENGARUH INTERAKSI SOSIAL TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN FASILITAS DI TAMAN LAPANG MERDEKA KOTA SUKABUMI. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/ijsp.v5i1.8741>
- Kusuma, A. (2024). Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penataan Ruang Publik dan Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 18(1). <https://doi.org/10.35475/ripteck.v18i1.255>
- Muhammad, F. R., Pratiwi, R. A., & Hutriani, I. W. (2024). Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Ekologi dan Sosial di Kampung 3-4 Ulu Laut, Kota Palembang. *Desa-Kota*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v6i2.79059.112-126>
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). Basic Methods of Policy Analysis and Planning Third Edition. In *Edition 3*.
- Rasyid, Y., & Purbaningrum, D. G. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN TAMAN KOTA II DI KOTA TANGERANG SELATAN. *PENTAHILIX*, 2(1). <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.91-108>
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. In *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* (Vol. 3, Issue 1).
- Tonapa Arung, H., Widyastomo, D., Arung Lamba, M., & Kampwolker Yabansai Waena Jayapura, J. (2025). Perancangan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau Berkelanjutan (Studi Kasus: Taman Mandiri Kota Jayapura). *Perencanaan Tata Ruang Dan Teknik Sipil*, 3.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

- Tri Setyowati, Meidiva Amanda, Afifah Shafa, & Pepi Rizqi. (2024). Efektivitas Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Aset Taman Kota Berkelanjutan di Kota Bandung. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 15(1). <https://doi.org/10.35313/irwns.v15i1.6260>
- Weiss, C. H. (1995). Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory-Based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children and Families. *New Approaches to Evaluating Community Initiatives: Concepts, Methods, and Contexts*, 7.
- Yusuf Wibisono. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR. In *Widina Bhakti Persada Bandung*.: Vol. Vol.1.
- Zilhakim, R. (2018). Aksi Skateboarder Jajal Ampera Skate Park Pertama di Kota Palembang. *Sripoku.Com*. <https://palembang.tribunnews.com/2018/02/04/aksi-skateboarder-jajal-ampera-skate-park-pertama-di-kota-palembang>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik) 206

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX

